BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia karena berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebagai negara agraris, sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung kegiatan pertanian, mulai dari lahan yang subur hingga iklim tropis yang memungkinkan produksi sepanjang tahun. Oleh karena itu, sektor pertanian tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah rendahnya produktivitas akibat penggunaan teknologi yang belum optimal serta keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian modern. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sektor ini. Permasalahan lain seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar turut memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan usaha pertanian di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Upaya tersebut meliputi penyediaan subsidi pupuk, pengembangan teknologi pertanian,

peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani. Selain itu, penerapan konsep pertanian berkelanjutan juga mulai digalakkan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih optimal.

Penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Penyuluhan pertanian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Secara umum, penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha agar mereka mampu mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan usaha tani. Dalam UU No. 16 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyuluhan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan tidak hanya bersifat penyampaian informasi, tetapi juga mendorong petani untuk aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Sistem penyuluhan pertanian melibatkan berbagai kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah membentuk lembaga penyuluhan seperti Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat pula tenaga penyuluh pertanian yang terdiri dari penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya. Peran penyuluh sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah, lembaga penelitian, dan petani dalam mentransfer inovasi dan teknologi pertanian.

Lebih lanjut, peraturan ini juga menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam kegiatan penyuluhan. Setiap program penyuluhan harus disusun berdasarkan kebutuhan petani dan kondisi wilayah setempat, sehingga hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program serta sebagai dasar perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan penyuluhan pertanian di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan daya saing sektor pertanian secara keseluruhan.

Program penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan rangkaian kegiatan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar mampu mengelola usaha tani secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Program ini menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian karena berfungsi sebagai sarana transfer inovasi dan teknologi dari pemerintah maupun lembaga penelitian kepada petani sebagai pelaku utama. Melalui program penyuluhan, diharapkan petani dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, serta kesejahteraan hidupnya.

Secara umum, program penyuluhan pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah, sehingga setiap daerah memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kondisi lokalnya. Program ini biasanya mencakup

beberapa kegiatan utama seperti penyuluhan teknis budidaya, pengendalian hama dan penyakit tanaman, penggunaan pupuk yang tepat, serta penerapan teknologi pertanian modern. Selain itu, penyuluhan juga mencakup aspek manajemen usaha tani, seperti perencanaan produksi, pemasaran hasil pertanian, dan pengelolaan keuangan, sehingga petani tidak hanya mampu memproduksi tetapi juga mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Program penyuluhan pertanian dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode langsung meliputi pertemuan kelompok tani, demonstrasi lapangan (demplot), pelatihan, dan kunjungan individu oleh penyuluh. Sementara itu, metode tidak langsung dapat dilakukan melalui media massa, seperti radio, televisi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Pendekatan kelompok tani sering digunakan karena dinilai lebih efektif dalam mendorong partisipasi dan pertukaran pengalaman antarpetani.

Keberhasilan program penyuluhan pertanian sangat bergantung pada peran aktif penyuluh dan partisipasi petani. Penyuluh berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu petani dalam mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi yang tepat. Di sisi lain, petani diharapkan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan menerapkan inovasi yang diberikan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan program penyuluhan, yaitu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Implementasi program penyuluhan pertanian di Indonesia merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani

melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pelaksanaan program ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang menekankan pentingnya penyuluhan sebagai sarana pemberdayaan petani. Dalam praktiknya, implementasi penyuluhan dilakukan melalui perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah, sehingga materi yang disampaikan relevan dengan kondisi agroekosistem dan permasalahan yang dihadapi petani setempat.

Penyuluhan pertanian dilakukan oleh tenaga penyuluh melalui berbagai metode, seperti pertemuan kelompok tani, demonstrasi plot (demplot), pelatihan teknis, serta kunjungan lapangan. Penyuluh berperan sebagai fasilitator yang menjembatani informasi dan inovasi dari pemerintah maupun lembaga penelitian kepada petani. Selain itu, implementasi program juga didukung oleh kelembagaan seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan yang menjadi pusat kegiatan penyuluhan. Pendekatan partisipatif menjadi kunci utama, di mana petani tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah penyuluh, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Program penyuluhan belum berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya partisipasi petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital agar

implementasi program penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana implementasi program tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan implementasi program tersebut.

Setelah melakukan pengamatan sementara mengenai Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Maka dapat diketahui beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi oleh penyuluh pertanian kepada masyarakat tani, sehingga masih terdapat petani yang kurang memahami tujuan, manfaat, serta teknik pertanian yang disosialisasikan dalam program penyuluhan. Selain itu, koordinasi antara penyuluh dengan kelompok tani maupun pemerintah desa terkadang mengalami hambatan, seperti keterlambatan informasi jadwal kegiatan dan kurangnya intensitas sosialisasi, yang menyebabkan partisipasi petani dalam mengikuti program penyuluhan masih belum maksimal. *(Sumber:Dokumentasi Data)*
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan. Banyak penyuluh pertanian yang belum memiliki fasilitas memadai seperti alat peraga, media penyuluhan, maupun teknologi informasi yang dapat

menunjang penyampaian materi kepada petani. Kondisi ini menyebabkan proses transfer pengetahuan menjadi kurang efektif dan kurang menarik bagi petani. Transportasi operasional bagi penyuluh juga menjadi kendala utama. Di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, penyuluh kesulitan menjangkau lokasi kelompok tani karena minimnya kendaraan dinas atau akses jalan yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya frekuensi kunjungan penyuluh ke lapangan sehingga program penyuluhan tidak berjalan secara optimal. *(Sumber: Data Aset Sasana Prasarana)*

3. Masih rendahnya pemahaman penyuluh pertanian terhadap substansi kebijakan program penyuluhan menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya penyuluh yang hanya menjalankan kegiatan secara rutinitas tanpa mengacu pada tujuan strategis program, sehingga hasil penyuluhan kurang optimal dalam meningkatkan kapasitas petani. Sebagian penyuluh pertanian belum sepenuhnya memahami isi dan arah kebijakan penyuluhan yang dikeluarkan pemerintah, terutama terkait metode penyuluhan partisipatif. Akibatnya, pendekatan yang digunakan masih bersifat satu arah (top-down), sehingga partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan menjadi rendah dan tujuan pemberdayaan tidak tercapai secara maksimal. *(Sumber: Observasi Lapangan)*
4. Struktur organisasi yang kurang jelas dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut mempengaruhi pelaksanaan program penyuluhan. Terkadang terjadi tumpang tindih tugas antara instansi terkait, serta

Koordinasi antar lembaga terkait seringkali lemah, pembagian tugas belum jelas, serta prosedur administrasi yang berbelit-belit menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan program penyuluhan tidak berjalan secara terarah dan kurang memberikan dampak yang signifikan. *(Sumber: Struktur Organisasi)*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian dengan judul **"Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan"** sangat tepat dilakukan untuk mengevaluasi program penyuluhan serta memberikan masukan atau saran untuk meningkatkan program tersebut.

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Adapun indikator penelitian implementasi program yang dipakai untuk penelitian ini adalah menurut George C. Edward III (Nia Ramadhani 2025) yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor apa Implementasi Program Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti khususnya

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

dalam bidang Ilmu Administrasi Publik serta dalam hal yang berhubungan dengan budaya organisasi dan Kinerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi Balai Penyuluhan Pertanian Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dalam upaya penerapan penyuluhan pertanian di Tebing Tinggi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI